

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi sistem kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui kombinasi desentralisasi dan sentralisasi. Sistem desentralisasi ini tidak bertujuan untuk memisahkan kedua tingkat pemerintahan, melainkan untuk meningkatkan kolaborasi antar unit pemerintah dalam mengelola negara. Prinsip Otonomi Daerah menjadi landasan dari sistem ini, yang merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat terkait struktur negara dan pemerintahan. Kerangka tata kelola ini diakomodasi oleh payung kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana tanggung jawab pemerintah dibagi, termasuk dalam sektor pariwisata, yang menjadi urusan kewenangan bersama antara satu lini Pemerintah yang berada di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pariwisata telah menjadi sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan sektor pariwisata mencakup lingkup berbagai aktivitas perjalanan yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, pelaku bisnis, serta pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan pariwisata meliputi perjalanan individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau eksplorasi atraksi tertentu, biasanya dalam jangka waktu sementara.

Perkembangan sektor pariwisata tidak hanya terlihat di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di mana pariwisata dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Contohnya dapat dilihat di daerah-daerah seperti Yogyakarta, Bali, dan berbagai kota serta provinsi lainnya di Indonesia. Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena telah menjadi kebutuhan masyarakat, dengan dampak positif yang dirasakan di berbagai sektor regional. PAD merupakan pemasukan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dengan perlindungan kebijakan peraturan daerah serta peraturan undang-undang yang berlaku, hal ini disesuaikan seperti yang menjadi bunyi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

**Tabel 1 : Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia
Selama Pandemi COVID-19 (2019-2022)**

Tahun	Jumlah Wisatawan Asing	Presentase penurunan	Keterangan
2019	16,1 Juta	-	Sebelum pandemi Covid-19
2020	4,02 Juta	75,03%	Tahun pertama pandemi Covid-19
2021	1,56 Juta	61,19% (dibanding 2020)	Pembatasan kebijakan traveling (Perjalanan)
2022	5,47 Juta	Meningkat 250,6% (dibanding2021)	Pelonggaran kebijakan traveling (perjalanan)

Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2021). Laporan Kinerja Tahun 2020 & Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2023). Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2022.

Menurut data tabel 1 diatas yang diambil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2020 turun drastis sebesar 75,03% dibandingkan tahun 2019, dari 16,1 juta menjadi hanya 4,02 juta kunjungan (Kemenparekraf, 2021). Penurunan ini disebabkan oleh keberadaan pandemi COVID-19 yang mewabah sehingga mendorong kebijakan yang jauh lebih ketat sebagai prioritas untuk mencegah dampak penyebaran yang lebih jauh, seperti; pembatasan perjalanan internasional, penutupan destinasi wisata, serta ketidakpastian global yang membuat masyarakat enggan melakukan perjalanan. Ini mempengaruhi keberadaan sektor pariwisata, yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, mengalami stagnasi yang memengaruhi perekonomian nasional dan daerah.

Sektor pariwisata Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada era *new normal*. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia secara bertahap membuka kembali destinasi wisata dan melonggarkan kebijakan pembatasan, termasuk menghapus kebijakan karantina bagi wisatawan asing yang telah divaksinasi lengkap. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisman meningkat menjadi 5,47 juta, meskipun masih jauh di bawah angka sebelum pandemi (BPS, 2023). Pemulihan ini didukung oleh program-program pemulihan pariwisata yang digalakkan oleh pemerintah, seperti *CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)* yang bertujuan untuk memastikan bahwa destinasi wisata aman dan siap menerima kunjungan

wisatawan. Di tingkat daerah, pemulihan pariwisata juga terlihat dengan kembalinya aktivitas wisata di destinasi utama seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Lombok. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang kaya, menjadi fokus utama pemulihan pariwisata pasca COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti program "Jelajah Jawa Tengah" yang bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata unggulan di wilayahnya, termasuk Candi Borobudur, Dieng Plateau, dan Kota Semarang (Pemprov Jawa Tengah, 2022). Selain itu, upaya pemasaran digital melalui media sosial dan platform online juga dilakukan untuk menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Wisatawan domestik menjadi tulang punggung pemulihan pariwisata selama masa transisi ini, dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat signifikan pada tahun 2022.

Kabupaten Karanganyar yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah berusaha menggenjot sektor pariwisata dengan basis pendekatan pada kekayaan alam dan kearifan lokal sebagai potensi pemasukan daerah. Potensi tersebut dititik beratkan pada pengembangan pariwisata yang ada di Lereng Gunung Lawu, sebab wilayah tersebut memiliki kekayaan alam yang signifikan dan kondisi budaya yang terjaga. Dengan keindahan alam yang memukau, seperti air terjun Grojogan Sewu, kebun teh Kemuning, dan kawasan wisata Candi Sukuh, Kabupaten Karanganyar memiliki daya tarik wisata yang menjanjikan. Selain itu, kearifan lokal yang masih terjaga, seperti upacara adat dan kerajinan tangan, dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan pariwisata. Dengan memfokuskan

pembangunan pada sektor pariwisata, Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kondisi yang diterapkan Kabupaten Karanganyar melalui peningkatan pengembangan wisata berbasis alam dan kearifan lokal, sejalan dengan apa yang telah diupayakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pertumbuhan ekonomi lokal daerah mampu digenjot melalui salah satu sektor wisata yang berbasis dengan potensi alam dan budaya lokal (Kemenparekraf, 2021).

Lebih dalamnya, hal tersebut juga mendorong adanya dampak positif yang jauh lebih dalam, seperti meningkatnya potensi lapangan kerja yang akan diisi oleh penduduk lokal. Misalnya, dengan mengembangkan desa wisata yang memadukan keindahan alam dan budaya lokal, masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, atau penjual cenderamata. Selain itu, ini juga dapat melestarikan kebudayaan lokal (Prasetyo et al., 2020)

Pengembangan pariwisata dan kearifan lokal juga dapat memperkuat identitas budaya Kabupaten Karanganyar. Dengan mempromosikan budaya lokal, seperti batik khas Karanganyar atau upacara adat yang unik, daerah ini dapat membangun citra yang kuat sebagai destinasi wisata budaya. Pelestarian kearifan lokal melalui pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempertahankan warisan budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tradisi (UNESCO, 2019).

Berbicara mengenai kondisi wisata di Kabupaten Karanganyar, tentu saja juga memiliki potensi wisata dengan basis kekayaan alam. Pemerintah Kabupaten

Karanganyar memberikan dukungan pada sektor wisata tersebut, salah satunya adalah wisata unggulann Grojogan Sewu di Tawangmangu. Grojogan Sewu merupakan kekayaan alam Karanganyar berupa air terjun alami yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alam serta daya tarik dari Grojogan Sewu menjadikannya ikon wisata Karanganyar dan memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah. Mengingat potensi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan wisata ini *collaborative governance* guna menghadirkan pengelolaan wisata yang lebih profesional dan berdaya saing.

Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia terkait dengan upaya meningkatkan daya saing destinasi wisata. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, tetapi seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kebijakan, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal. Dengan menerapkan *collaborative governance*, semua pihak dapat bekerja sama untuk merumuskan strategi yang holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Selain itu, *collaborative governance* dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan pariwisata di Indonesia. Saat ini, sebagian besar destinasi wisata terkonsentrasi di beberapa daerah seperti Bali, Yogyakarta, atau Lombok, sementara daerah lain yang memiliki potensi serupa masih tertinggal. Dengan melibatkan pemerintah daerah,

masyarakat, dan pelaku usaha dalam proses pengelolaan, diharapkan dapat terjadi pemerataan pembangunan pariwisata. *Collaborative governance* juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa collaborative governance efektif dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah publik yang kompleks, termasuk pengelolaan pariwisata.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan Grojogan Sewu merupakan implementasi dari konsep *Collaborative Governance*. Konsep ini menekankan kolaborasi antara kedua pihak dalam pengembangan, promosi, dan optimalisasi daya tarik wisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi positif yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas wisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama dalam sektor UMKM, transportasi, dan perhotelan.

Menurut Jung et al. (2009), *Collaborative Governance* adalah suatu proses di mana berbagai organisasi lintas sektor bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak dapat diatasi oleh satu organisasi atau masyarakat secara mandiri. Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata seperti Grojogan Sewu, model ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam pembangunan dan pengelolaan suatu daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak lagi dominan, dan diperlukan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta, masyarakat umum, akademisi, dan media. *Collaborative*

Governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan manajemen sumber daya alam. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, *Collaborative Governance* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif karena didukung oleh pengetahuan dan informasi yang lebih luas dari berbagai pihak. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menghindari duplikasi kerja dan pemborosan sumber daya, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata, *Collaborative Governance* menjadi penting karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengembangan infrastruktur, promosi, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Namun, di tengah pelaksanaan kolaborasi tersebut, pandemi COVID-19 melanda dan berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Karanganyar, termasuk Grojogan Sewu. Penurunan jumlah wisatawan, pembatasan sosial, dan kebijakan kesehatan masyarakat mengakibatkan sektor pariwisata terpuruk dan mengalami kerugian yang cukup besar. Pemerintah daerah dan pihak swasta kemudian menghadapi tantangan baru dalam upaya pemulihan destinasi wisata ini. Kabupaten Karanganyar sendiri telah menerapkan *Collaborative Governance*

dengan melakukan kerja sama dengan PT. Duta Indonesia Djaya tentang pengembangan pariwisata alam di taman wisata alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar, sehingga kedua belah pihak merasakan atas kerugian dan dampak dari pandemi Covid-19 hingga membuat wisata alam Grojogan Sewu tutup total dan tidak mendapatkan profit. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar, menciptakan gelombang perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi lokal. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang menjanjikan.

Kabupaten Karanganyar menghadapi tantangan serius seiring dengan penyebaran virus yang meluas. Karanganyar dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik dengan keindahan alam, situs sejarah, dan budaya yang kaya. Namun, langkah-langkah pembatasan, lockdown, serta kekhawatiran akan kesehatan masyarakat memicu penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang berkunjung. Situs-situs wisata yang sebelumnya ramai, seperti Candi Sukuh, Grojogan Sewu, dan Taman Balekambang, mengalami penurunan kunjungan yang signifikan. Industri pariwisata di Karanganyar terdampak secara luas, termasuk pengelolaan akomodasi, restoran, dan usaha kecil lainnya. Banyak pelaku usaha pariwisata terpaksa menutup sementara atau mengurangi operasional mereka karena minimnya kunjungan wisatawan hal ini menjadi masalah serius bagi masyarakat lokal yang hanya bergantung atas keramaian wisata alam grojogan sewu untuk mencari nafkah yang mana ini bisa menjadi persoalan yang menjadi urgensi maka dari itu penting bagi pemerintah dan pihak swasta untuk memiliki cara atau strategi untuk bisa memulihkan kembali wisata alam grojogan sewu pasca pandemi.

Tabel 2 : Jumlah Wisatawan Lokal di Grojogan Sewu

Bulan	2020	2021
Januari	30.604	9.219
Febuari	13.047	5.619
Maret	5.844	10.239
April	Ditutup	8.839
Mei	Ditutup	22.677
Juni	Ditutup	14.743
Juli	11.558	Ditutup
Agustus	21.912	Ditutup
September	15.442	10.692
Oktober	18.500	31.011
November	16.595	16.067
Desember	13.474	25.211
Jumlah Kunjungan	146.976	154.317

Sumber : Opendata Kab. Karanganyar 2022

Bedasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah wisatawan lokal di Grojogan Sewu pada tahun 2020 yang hanya menyentuh 146.976, pada tahun 2021 Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering kita sebut sebagai PSBB sehingga wisata alam grojogan sewu mendapat jumlah pengunjung lokal yang meningkat berada pada angka 154.317 pada tahun 2021. Namum jumlah ini masih dirasa kurang terutama bagi para pengusaha lokal yang merasakan dampak langsung pada penghasilan dan keberlanjutan usaha mereka, terutama yang bergantung pada kehadiran wisatawan. Selain itu, sektor kerajinan dan industri kreatif yang terkait dengan pariwisata seperti kerajinan tangan dan produk souvenir lokal, juga mengalami penurunan.

Pekerja di sektor ini merasakan dampak ekonomi secara langsung, dengan hilangnya pesanan dan penjualan yang menurun tajam.

Bedasarkan penjelasan diatas serta menimbang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.661/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Seluas 20 (dua puluh) Hektar di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atas nama PT. Duta Indonesia Djaya, Peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas *Collaborative Governance*. Dalam konteks ini kerja sama antar pihak menjadi kunci untuk menyusun strategi pemulihan yang holistik dan inklusif. *Collaborative Governance* menciptakan platform di mana semua pihak dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta. Serta memberikan peluang untuk menyelaraskan visi bersama dan mengidentifikasi prioritas pemulihan.

Berbagai penelitian tentang *Collaborative Governance* pernah dilakukan seperti Rillia Aisyah Haris, Findriasih dan Imam Hidayat (2022) tentang pengembangan wisata bukit Tawapleng-Leng dalam perspektif Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan destinasi wisata Bukit Tawap Leng-Leng dalam perspektif Collaborative Governance. Pendekatan ini diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam pengembangan pariwisata, seperti keterbatasan sumber daya, kemampuan manajerial, serta minimnya modal. Ketidakmampuan BUMDes dalam mengelola pengembangan wisata mendorong adanya kolaborasi dengan

berbagai pihak, termasuk investor, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan Pemerintah Desa Pagarbatu.

Penelitian ini berlandaskan pada teori Collaborative Governance dan teori Pengembangan Pariwisata, yang menjadi dasar dalam menganalisis fenomena tersebut. Hasil sementara penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan wisata telah mencapai tahap penyelesaian sekitar 60–70%. Pelaksanaan Collaborative Governance dalam penelitian ini berjalan secara efektif, khususnya dalam aspek *Trust Building* dan *Commitment to Process* di antara para pemangku kepentingan, yang berkontribusi pada pencapaian kesepakatan serta dampak positif terhadap pengembangan wisata Bukit Tawap Leng-Leng. Dampak tersebut terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan serta perbaikan infrastruktur yang lebih memadai. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan perspektif Collaborative Governance, tetapi berbeda dalam hal subjek penelitian yang dikaji.

Selanjutnya adapula penelitian terkait yang dilakukan oleh Irfan Nugroho, Yusuf Adam Hilman (2020) dengan judul penelitian Sinergitas Program “Fantastic! Ponorogo” Dalam Rangka Pembangunan Pariwisata Berbasis *Collaborative Governance* Di Kabupaten Ponorogo. Kajian ini mengulas keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas wisata di Provinsi Jawa Timur. Penerapan konsep *Collaborative*

Governance menjadi representasi kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dengan tujuan mengoptimalkan pencapaian target kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program *Fantastis! Ponorogo* dapat bersinergi dalam implementasi *Collaborative Governance* di sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo. Kajian ini berlandaskan pada tiga teori utama, yaitu teori Sinergitas, *Collaborative Governance*, dan Pembangunan Pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Collaborative Governance* telah mencapai tingkat sinergi yang efektif dan berhasil. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: (1) komitmen yang kuat dari Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, khususnya kepala dinas yang mendukung pelaksanaan program wisata tahun 2019; (2) terjalinnya kolaborasi dan konektivitas yang solid di antara pemangku kepentingan; (3) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata yang diselenggarakan; serta (4) peran program ini sebagai media pembelajaran yang efektif bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian terhadap mekanisme kerja *Collaborative Governance* dalam sektor pariwisata. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta subjek yang menjadi objek kajian.

Pada penelitian terdahulu yang ketiga terdapat penelitian dengan judul serupa yakni *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu) yang dilakukan oleh

Matthoriq, Soesilo Zauhar, Romy Hermawan. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan wisata desa dari perspektif *co-governance*, khususnya di kawasan wisata agrowisata Bumiaji, Kota Wisata Batu. Perkembangan pesat sektor pariwisata di Kota Batu yang masih didominasi oleh destinasi wisata buatan telah menyebabkan perhatian utama tertuju pada pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan pariwisata. Hingga saat ini, upaya untuk menghadirkan ikon-ikon baru berupa destinasi pariwisata berbasis komunitas di Kota Batu masih mengalami keterbatasan akibat terbatasnya sumber daya dari masing-masing pemangku kepentingan.

Sejalan dengan tuntutan tata kelola pariwisata yang baik (*Good Tourism Governance*), pengelolaan pariwisata tidak dapat lagi dilakukan oleh satu aktor saja. Pendekatan *Collaborative Governance* telah dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif dalam meningkatkan karakteristik destinasi wisata serta membangun jaringan pariwisata, terutama dalam pembentukan koperasi tata kelola desa wisata di Kota Wisata Batu.

Dalam penelitian ini, enam teori digunakan sebagai dasar analisis, yaitu *Networking dalam Manajemen Publik*, *Collaborative Governance*, *Collaborative Governance and Innovation*, *Pariwisata Desa*, *Tata Kelola Kepariwisata yang Baik (Good Tourism Governance)*, dan *Agrowisata*. Penelitian ini tidak secara eksplisit menyajikan hasil penelitian tertentu, tetapi lebih menyoroti pentingnya *Collaborative Governance* dalam pengembangan pariwisata pedesaan di Kota Wisata Batu, serta tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam memastikan keberlanjutan sektor pariwisata di daerah tersebut.

Ditekankan bahwa *Collaborative Governance* diperlukan sebagai solusi alternatif dalam memperkuat karakter destinasi wisata dan membangun jaringan pariwisata. Selain itu, ditekankan pula bahwa pengelolaan pariwisata tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu aktor saja, melainkan memerlukan kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata dalam pengembangan sektor ini.

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi tata kelola pariwisata pedesaan di Kota Batu melalui perspektif *Collaborative Governance*, dengan menekankan perlunya kesamaan tujuan, kejelasan visi, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus terhadap penerapan *Collaborative Governance* dalam sektor pariwisata. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan subjek yang dikaji.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muchamad Zaenuri dengan judul Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan urgensi tata kelola yang efektif dalam pengelolaan pariwisata pascabencana. Manajemen pariwisata dalam kondisi pascabencana memerlukan pergeseran dari tata kelola adaptif menuju *Collaborative Governance*, dengan menitikberatkan pada pembagian manfaat dan risiko serta integrasi sumber daya di antara pilar tata kelola.

Dalam studi ini, ditekankan bahwa daya saing dalam pariwisata pascabencana sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain keberadaan atraksi lingkungan,

pariwisata sebagai sektor unggulan, efektivitas saluran distribusi dan pemasaran, serta peran sektor swasta yang dinamis sebagai penyedia layanan pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dianggap sebagai elemen kunci dalam pengelolaan pariwisata pascabencana, sementara jaringan sinergis diperlukan untuk mempercepat respons serta meningkatkan efektivitas manajemen.

Kajian mengenai pergeseran model tata kelola dalam menghadapi perubahan yang terjadi akibat bencana masih terbatas. Konsep tata kelola sendiri bersifat kompleks dan tidak hanya terbatas pada pendekatan pemerintahan tradisional, melainkan juga mencakup berbagai paradigma, seperti layanan publik baru, tata kelola publik, tata kelola adaptif, dan *Collaborative Governance*.

Dalam penelitian ini, digunakan tiga teori utama, yaitu *Collaborative Governance*, Tata Kelola Publik, dan Manajemen Pariwisata. Berdasarkan teori tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola yang efektif sangat diperlukan dalam pengelolaan pariwisata pascabencana. Selain itu, diperlukan adanya pergeseran paradigma dari tata kelola adaptif menuju *Collaborative Governance* dalam konteks ini. *Collaborative Governance*, yang menekankan pada kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama di antara berbagai pemangku kepentingan, dipandang sebagai pendekatan utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di masa pasca bencana.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa daya saing pariwisata pasca bencana sangat bergantung pada faktor-faktor seperti atraksi lingkungan, keberadaan sektor swasta yang kuat, serta efektivitas distribusi dan pemasaran. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dipandang sebagai hal yang krusial dalam

pengelolaan pariwisata pasca bencana, sedangkan jaringan sinergis diperlukan untuk mempercepat respons dan meningkatkan efektivitas manajemen.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian terhadap implementasi *Collaborative Governance* dalam sektor pariwisata. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi serta subjek yang menjadi objek kajian.

Penelitian selanjutnya telah dilakukan oleh Muhamad Abdel Apalso, Kristina Setyowati dengan judul penelitian Pengembangan Pariwisata Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dalam Perspektif Collaborative Governance Studi di Kampung Blangkon Potrojayan Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Pariwisata kreatif merupakan konsep pariwisata yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan komunitas lokal. Kota Surakarta, sebagai kota yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejarah yang pesat, telah terbentuk melalui nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu bentuk warisan budaya fisik yang masih dapat ditemukan adalah Desa Blangkon Potrojayan, yang terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan. Namun, dalam dua dekade terakhir, desa ini mengalami degradasi yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses kolaborasi antara pemangku kepentingan serta hambatan yang muncul dalam proses tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengoptimalkan kerja sama yang lebih efektif. Dalam penelitian ini, digunakan teori proses kolaboratif yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash,

yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu (1) dialog tatap muka, (2) pembangunan kepercayaan, (3) komitmen terhadap proses, (4) saling pengertian, dan (5) pencapaian hasil perantara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain ketiadaan forum komunikasi yang efektif, adanya ego sektoral dari masing-masing pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta peran yang belum optimal dari aktor-aktor yang terlibat. Selain menggunakan teori proses kolaboratif Ansell dan Gash, penelitian ini juga merujuk pada teori De Seve, yang menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya dalam mengukur keberhasilan *Collaborative Governance*. Selain itu, konsep pembangunan kepercayaan juga ditekankan sebagai elemen penting dalam menyelaraskan persepsi dan pengambilan keputusan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata kreatif.

Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata kreatif yang berbasis pada kearifan lokal. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian terhadap implementasi *Collaborative Governance* dalam sektor pariwisata. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta subjek yang menjadi objek kajian.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul berbagai pertanyaan yang berangkat dari sebuah permasalahan *Collaborative Governance* Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karanganyar, maka selanjutnya dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* yang sudah berjalan di Kabupaten Karanganyar antara Dinas Pariwisata dan Olahraga Kab. Karanganyar dengan PT. Duta Indonesia Djaya terkait pemulihan wisata alam Grojogan Sewu?
2. Bagaimana Efektivitas *Collaborative Governance* dalam rangka pemulihan serta peningkatan jumlah wisatawan padaa wisata alam grojogan sewu pasca pandemi?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas serta peran dari pemangaku kekuasaan dalam *Collaborative Governance* di kabupaten Karanganyar dalam pemulihan sektor wisata Grojogan Sewu pasca pandemi covid-19.

1. 4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. 4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan dapat menambah pengetahuan dan perspektif pembaca serta menyumbangkan pikiran kepada perkembangan ilmu

pemerintahan mengenai *collaborative governance* dalam upaya strategis pasca pandemi covid-19 di kabupaten karanganyar Selain itu, manfaat dari penelitian ini juga terletak pada penjelasan terkait pentingnya *Collaborative Governance* untuk dapat memulihkan dan meningkatkan sektor wisata pada suatu daerah. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi utama dalam penelitian-penelitian lain yang memiliki topik serupa.

1. 4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini untuk pemerintah adalah memberikan kontribusi berupa masukan dan pemikiran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai panduan dalam Pentingnya inovasi penerapan *Collaborative Governance* yang berkelanjutan setelah pandemi COVID-19. Dengan demikian, *Collaborative Governance* menjadi kunci untuk menyusun strategi pemulihan yang holistik dan inklusif. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat, *Collaborative Governance* menciptakan platform di mana semua pihak dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pembaca mengenai urgensi Kerjasama dalam mengembangkan serta memelihara keindahan alam yang dapat juga digunakan sebagai objek wisata alam.

1. 5 Kajian Teoritis

1. 5.1 *Collaborative Governance*

Collaborative governance berkembang secara adaptif sebagai respons terhadap kompleksitas dan konflik dengan nuansa politik atau isu-isu yang membutuhkan penerapan nilai-nilai demokrasi. Konsep ini tidak didasari oleh filosofi atau teori politik tertentu, melainkan muncul sebagai pendekatan pragmatis untuk menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan melalui teori-teori konvensional yang sebelumnya dianggap efektif. Pada kenyataannya, kolaborasi sering kali dilakukan karena ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi saja, sehingga diupayakan penyelesaian melalui kolaborasi. Dengan cara ini, diharapkan masalah yang ada dapat teratasi. Namun, kolaborasi akan lebih efektif jika pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan kebutuhan bersama terkait masalah yang dihadapi.

Menurut Chris Ansell dan Alison Gash (2008) dalam jurnal berjudul "*Collaborative Governance in Theory and Practice*" yang dipublikasikan oleh *Oxford University Press* atas nama *Public Management Research Association*, *Collaborative Governance* dijelaskan sebagai bentuk tata kelola baru yang melibatkan dan menyatukan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta dalam suatu forum kolektif. Forum ini difasilitasi oleh lembaga publik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Tujuan utama dari *Collaborative Governance* adalah mendorong kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang optimal.

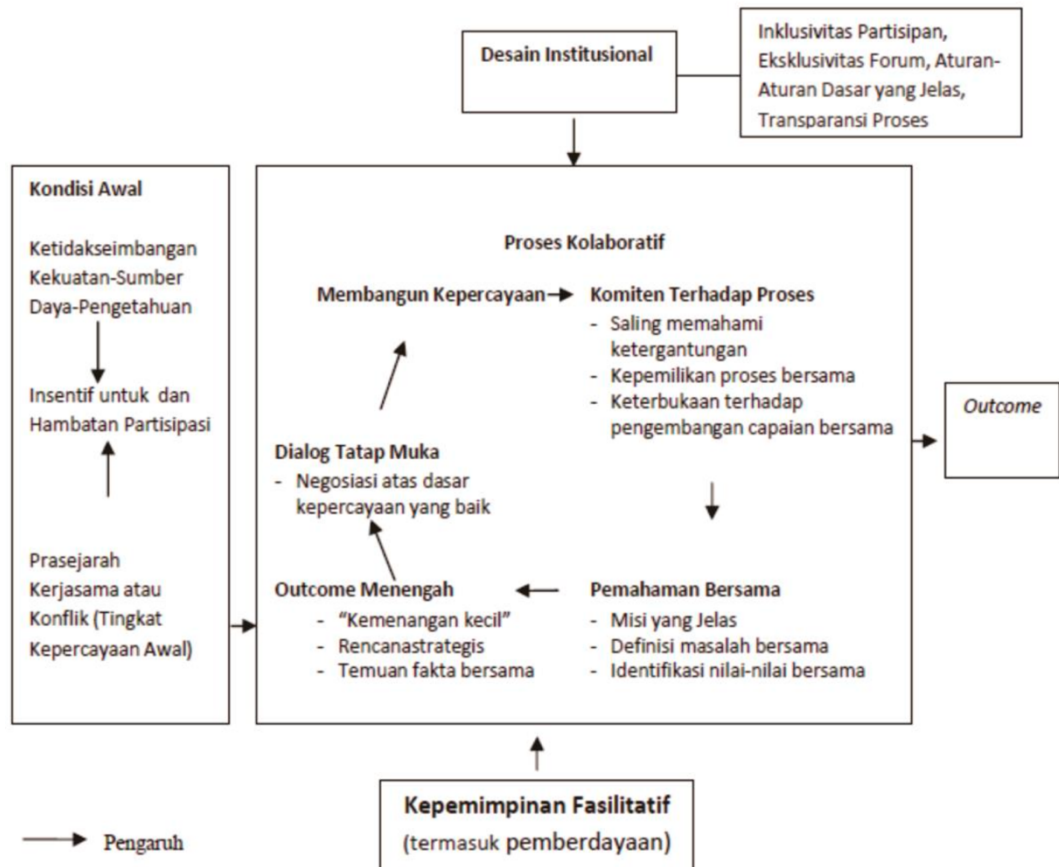
Lebih lanjut, Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai:

"a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets"

Artinya, Collaborative Governance adalah suatu pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah (swasta) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif. Tujuannya adalah untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik.

Collaborative Governance mengacu pada pendekatan terstruktur di mana lembaga publik secara sengaja melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Model ini dicirikan oleh interaksi formal yang berfokus pada konsensus dan musyawarah, dengan tujuan menetapkan atau menerapkan kebijakan dan program publik yang melayani kepentingan masyarakat. Keunggulan *Collaborative Governance* terletak pada kemampuannya untuk membawa berbagai pemangku kepentingan ke dalam inti proses pengambilan keputusan, menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan representatif.

Gambar 1: Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash



Sumber : Ansell dan Gash 2008 : 550

Model *Collaborative Governance* yang ditetapkan oleh Ansell dan Gash menekankan pentingnya inklusivitas, rasa hormat, dan komitmen bersama terhadap tujuan bersama dalam pembuatan kebijakan. Ini berusaha untuk mengatasi masalah publik dengan memanfaatkan wawasan dan sumber daya kolektif dari aktor negara dan *non-state*, menciptakan pendekatan pemerintahan yang tidak hanya lebih demokratis tetapi juga lebih efektif dalam mengatasi kompleksitas tantangan publik modern, dalam prakteknya teori ini dapat diuraikan dalam 4 tahap yakni :

1. Kondisi Awal

Tahap pertama dalam proses collaborative governance adalah kondisi awal, yang mencakup faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadinya kolaborasi. Kondisi awal ini meliputi adanya ketergantungan antar-pihak, ketidakpastian, atau konflik yang mendorong para pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama. Selain itu, sejarah hubungan antar-pihak juga memegang peranan penting. Jika sebelumnya telah terjadi kerja sama yang baik, maka kemungkinan kolaborasi akan lebih besar. Sebaliknya, jika terdapat sejarah konflik atau ketidakpercayaan, proses kolaborasi mungkin akan lebih sulit dimulai. Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi awal ini menjadi fondasi yang menentukan apakah kolaborasi dapat berjalan efektif atau tidak.

2. Desain Institusional

Tahap kedua adalah desain institusional, yang merujuk pada struktur dan aturan yang mengatur proses kolaborasi. Desain ini mencakup penentuan siapa yang akan terlibat, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, serta aturan main yang disepakati bersama dalam bentuk perjanjian hitam diatas putih. Penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan dilibatkan secara inklusif dan transparan. Desain institusional yang baik akan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi aktif dan adil dari semua pihak. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa desain institusional yang efektif dapat mengurangi risiko dominasi oleh satu kelompok dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan tahap ketiga yang berperan penting dalam mengarahkan proses kolaborasi. Pemimpin fasilitatif bertugas untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar, mengelola dinamika kelompok, dan menjaga fokus pada tujuan bersama. Pemimpin ini tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai katalisator yang mendorong terciptanya konsensus. Menurut Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif yang efektif dapat mengatasi hambatan komunikasi dan membangun kepercayaan antar-pihak, yang merupakan kunci keberhasilan kolaborasi.

4. Proses Kolaboratif

Tahap terakhir adalah proses kolaborasi itu sendiri, yang terdiri dari tiga elemen utama: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap hasil. Dialog tatap muka memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung, menyampaikan kepentingan, dan mencari solusi bersama. Pembangunan kepercayaan adalah proses yang berkelanjutan, di mana para pihak belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Terakhir, komitmen terhadap hasil memastikan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa proses kolaborasi yang baik akan menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, karena melibatkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan.

Bedasarkan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* mewakili strategi pemerintah untuk menangani masalah publik melalui kemitraan dengan beragam pemangku kepentingan baik dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam tentang kolaborasi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi keselarasan dengan definisi dan kriteria yang diuraikan oleh Ansell dan Gash. Analisis ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa kerja sama di antara para pemangku kepentingan dalam penelitian ini mewujudkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* yang efektif dalam proses pemulihan wisata alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar.

1. 5.2 Efektivitas atau Keberhasilan Kolaborasi

Efektivitas juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memilih dan mencapai tujuan yang tepat, menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas sering diukur dengan sejauh mana tujuan fungsional dan operasional terpenuhi. Pada dasarnya, efektivitas mencerminkan seberapa sukses sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas dalam upaya kolaboratif dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian target, yang mencerminkan seberapa baik suatu tujuan telah terpenuhi. Menurut DeSeve (Sudarmo, 2011:110-116) *Collaborative Governance* dapat dinilai efektivitasnya melalui delapan indikator, antara lain:

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Struktur jaringan merupakan penjelasan tentang deskripsi dari sebuah kolaborasi yang terjadi yang mengikat antara satu elemen dengan yang lain

yang menyatu bersama-sama serta mencerminkan unsur-unsur fisik kerjasama. Milward dan Proven (dalam Sudarmo, 2011:111) mengategorikan jaringan dalam 3 bentuk yakni:

- a. *Self Governance*
- b. *Lead Organization*
- c. *Network Administrative Organization*

2. *Commitmen to Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Komitmen terhadap tujuan bersama adalah fondasi yang kuat bagi setiap kolaborasi yang sukses. Ketika semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan berkomitmen penuh terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka kolaborasi akan berjalan lebih efektif dan efisien.

3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan Antara Para Pihak)

Kepercayaan antar para pihak merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam membangun kolaborasi yang sukses. Ketika anggota tim saling percaya, mereka lebih terbuka untuk berbagi ide, berkolaborasi, dan mengatasi tantangan bersama. Kepercayaan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana setiap individu merasa dihargai dan dihormati. Dengan adanya kepercayaan, tim dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien dan efektif. Namun, membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Transparansi, konsistensi, empati, dan saling menghormati adalah beberapa kunci utama untuk membangun kepercayaan dalam sebuah tim.

4. *Adanya Kepastian Governance*

Adanya kepastian tate kolala yang termasuk dalam poin-poin berikut

a. Boundary and Exclusively

Menegaskan siapa yang termasuk anggota dan tidak anggota dalam sebuah lingkup kolaborasi yang terjadi.

b. Rules

Merupakan Batasan-batasan yang dibuat untuk membatasi perilaku atau ruang lingkup para anggota komunitas dalam sebuah kolaborasi dengan konsekuensi yang sudah disepekat.

c. Self Determinan

Yaitu kebebasan untuk menentukan suatu jaringan atau kolaborasi dijalankan dan siapa yang diizinkan untuk menjalakkannya.

d. Network Management

Merupakan lingkup resolusi atas penolakan dan tantangan alokasi sumber daya, control kualitas, dan pemeliharaan organisasi

5. *Acces to Authority* (Akses Terhadap Wewenang)

Akses terhadap wewenang dalam konteks kolaborasi merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok memiliki otoritas untuk membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek atau inisiatif bersama. Ini mencakup baik wewenang formal yang diberikan oleh organisasi, maupun wewenang informal yang diperoleh melalui keahlian, pengalaman, atau hubungan interpersonal.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (pembagian Tanggung Jawab)

Pembagian tanggung jawab adalah proses penentuan siapa yang bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan hasil akhir dalam sebuah kolaborasi. Ini melibatkan pembagian tugas secara jelas dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran serta kontribusinya. Pembagian tanggung jawab yang efektif adalah kunci keberhasilan sebuah kolaborasi

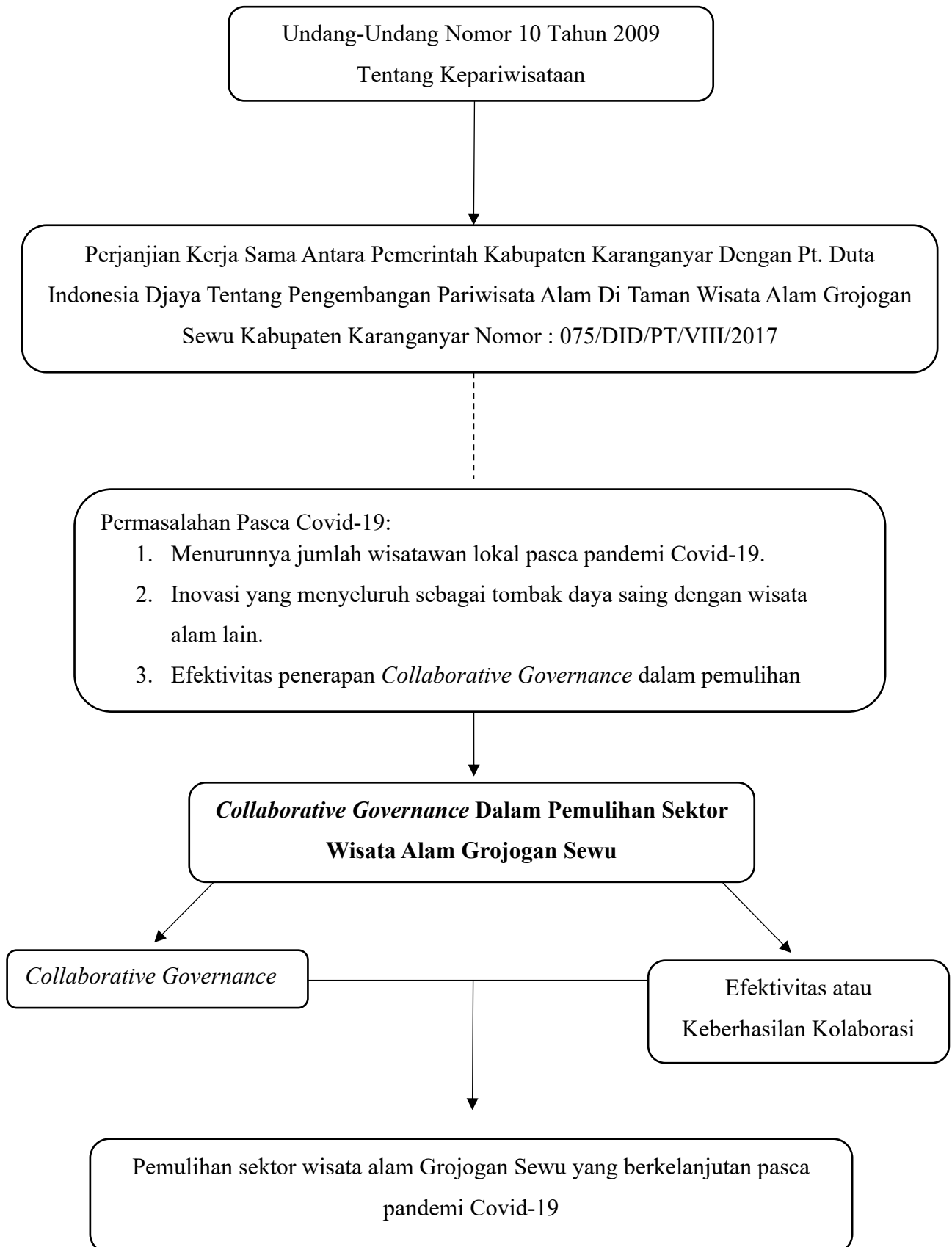
7. *Information Sharing* (berbagi Informasi)

Berbagi informasi merupakan jantung dari setiap kolaborasi yang sukses. Ketika informasi mengalir dengan bebas dan tepat waktu antara anggota tim, maka kolaborasi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Informasi yang dibagikan bisa berupa ide, data, pengetahuan, atau umpan balik.

8. *Access to Resources* (Akses Sumber Daya)

Akses sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi. Sumber daya dapat berupa apa saja, mulai dari finansial, teknologi, hingga sumber daya manusia. Ketika anggota tim memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan, mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif.

1. 6. Kerangka Berfikir



1. 7. Oprasionalisasi Konsep

Tabel 3 : Oprasionalisasi Konsep

Teori	Konsep	Defisini Konsep
Efektivitas atau Keberhasilan Kolaborasi	Struktur Jaringan	Struktur jaringan merupakan pemetaan stakeholder dari sebuah kolaborasi yang terjadi yang mengikat antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan Pt. Duta Indonesia Djaya mencerminkan unsur-unsur fisik kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan.
	Komitmen Terhadap Tujuan	Komitmen terhadap tujuan dalam konteks kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan Pt. Duta Indonesia Djaya merujuk pada kesepakatan yang kuat dan tekad bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor pariwisata. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam dan penerimaan atas tujuan tersebut oleh semua pihak yang terlibat, serta

		kesediaan untuk bekerja sama secara aktif untuk mencapainya.
	Kepercayaan Antar Pihak	Kepercayaan antar pihak dalam kolaborasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan Pt. Duta Indonesia Djaya merujuk pada keyakinan satu pihak terhadap kemampuan, integritas, dan komitmen pihak lain untuk bertindak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Ini adalah pondasi dasar yang memungkinkan terjadinya kerja sama yang produktif dan saling menguntungkan.
	Adanya Kepastian Governance	Kepastian governance dalam kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan Pt. Duta Indonesia Djaya mencakup beberapa aspek yang membantu memperjelas peran, tanggung jawab, dan aturan bagi para anggota.
	Akses Terhadap Wewenang	Dalam kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan Pt. Duta Indonesia Djaya. Akses Terhadap Wewenang merujuk

		pada seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh setiap pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, memengaruhi hasil akhir dari proyek atau inisiatif yang dijalankan bersama. Dalam konteks ini, wewenang formal biasanya diberikan kepada pihak-pihak berdasarkan struktur organisasi atau jabatan mereka, Selain itu, terdapat pula wewenang informal, yaitu kewenangan yang tidak resmi namun berpengaruh, seperti keahlian khusus, pengalaman, atau jaringan relasi yang dimiliki anggota.
	Pembagian Tanggung Jawab	Pembagian Tanggung Jawab berperan penting untuk memastikan setiap tugas, keputusan, dan hasil akhir memiliki pihak yang bertanggung jawab secara jelas. Proses ini melibatkan pembagian tugas yang spesifik, di mana masing-masing pihak baik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan Pt. Duta Indonesia Djaya memiliki peran dan kontribusi yang sudah ditentukan sesuai

		dengan keahlian dan kapasitas mereka. Pembagian tanggung jawab yang baik akan memastikan koordinasi yang lebih lancar, meminimalkan konflik, dan meningkatkan keberhasilan kolaborasi.
	Berbagi Informasi	Berbagi Informasi adalah faktor utama yang mendukung keberhasilan dan kelancaran kerjasama. Dengan aliran informasi yang terbuka dan konsisten, baik dinas pariwisata maupun pihak swasta dapat merespons perubahan dengan cepat, mengatasi tantangan dengan lebih terkoordinasi, serta mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik sektor pariwisata. Berbagi informasi ini menjadi pondasi yang kuat dalam memastikan setiap langkah kolaborasi terarah dan setiap anggota mendapatkan pemahaman yang sama atas kondisi serta tujuan proyek kolaboratif.
	Akses Terhadap Sumber Daya	Akses Sumber Daya merupakan aspek esensial yang mendukung keberhasilan program dan proyek bersama. Sumber daya yang dimaksud dapat mencakup pendanaan,

		teknologi, informasi, hingga sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus. Ketika kedua belah pihak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ini, setiap pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efisien dan produktif.
--	--	---

1. 8. Metode penelitian

1. 8.1. Desain penelitian

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan untuk memahami inti permasalahan. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pemberian makna dan interpretasi peneliti, yang berasal dari interpretasi fakta empiris dan data yang relevan. Fokus penelitian ini adalah memandang suatu fenomena melalui observasi praktis sosial dan kajian literatur. Penalaran dilakukan secara induktif dengan menganalisis data untuk mencapai kesimpulan empiris, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan. Pendekatan kualitatif dalam mazhab naturalisme mengharuskan peneliti untuk berpikir secara menyeluruh (Moeloeng, 2013). Oleh karena itu, data yang diperoleh diperinci lebih lanjut dengan mempertimbangkan dimensi struktural yang ada.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menangkap suatu fenomena dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang dibahas dalam literatur yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Desain penelitian studi kasus dipilih sebagai kerangka

untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian dengan memfokuskan kajian upaya inovasi strategis pada sektor pariwisata pasca pandemi covid-19 di kabupaten karanganyar. Sesuai dengan karakteristiknya, pendekatan studi kasus diharapkan dapat memberikan penelitian yang spesifik dan mendalam terhadap suatu fenomena tertentu dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, studi kasus juga dianggap sebagai metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan "how" dan "why" dalam penelitian (Yin, 2008). Desain penelitian studi kasus relevan dengan penelitian ini karena dapat mengeksplorasi gambaran lebih rinci tentang suatu fenomena.

1. 8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini bertempat di Wisata Alam Grojogan Sewu yang berada di Desa Beji, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Grojogan Sewu merupakan salah satu wisata alam dengan jumlah pengunjung terbanyak di Kabupaten Karanganyar. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten yang memiliki SDA yang banyak dimanfaatkan sebagai pariwisata yang dikhususkan dalam meningkatkan pendapatan daerah, dapat juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta sebagai bentuk pengelolaan SDA dengan memanfaatkan keindahan alam, keragaman budaya. Pemerintah daerah dan pihak swasta tidak luput pula dalam pengembangan serta pengelolaan SDA di Kabupaten Karanganyar yang sudah berjalan puluhan tahun, penelitian ini akan berfokus untuk mencari tahu efektivitas dalam pemulihan Wisata Alam Grojogan Sewu ditinjau dari persepsi *Collaborative Governance*.

1. 8.3. Informan Penelitian

informan yang akan dimintai data ataupun keterangan dipilih berdasarkan metode purposive sampling, yakni pertimbangan atas kriteria tertentu dengan rasionalisasi bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan informasi yang cukup sesuai kebutuhan penelitian.

Adapun yang menjadi informan tersebut antara lain adalah :

1. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
2. Kepala PT. Duta Indonesia Djaya
3. Kelompok masyarakat “Perdabita” (Persatuan pedagang bina wisata)

1. 8.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif menggunakan data dalam bentuk kata-kata tertulis, teks, frasa atau simbol-simbol yang merepresentasikan orang, tindakan, serta peristiwa pada suatu fenomena sosial. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

- a) Data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada informan penelitian.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan pengumpulan dokumen pendukung.

1. 8.5. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang krusial yang tidak boleh terlupakan dalam penelitian adalah bagaimana penulis mengumpulkan data, karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan sejauh mana keabsahan dan validitas tulisan dapat diandalkan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Beberapa teknik tersebut mencakup:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang menjadi informan penelitian. Informasi yang diperoleh dari narasumber dijadikan sebagai data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini dipakai peneliti untuk mendapatkan wawasan dari informan, Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau melalui obrolan daring (*chat*) jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan.

b) Dokumentasi

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada teknik pengumpulan data yang melibatkan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Beberapa metode yang diterapkan melibatkan pengambilan foto dokumen pendukung yang tersedia dalam bentuk fisik (*hard file*), serta pengumpulan salinan data jika dokumen tersebut tersedia dalam bentuk digital (*soft file*).

c) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data dari literatur yang telah tersedia, dengan syarat bahwa literatur tersebut memiliki relevansi dengan tema penelitian. Referensi yang diperoleh dari studi pustaka menjadi dasar untuk memperkuat pemahaman dan menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti memperoleh referensi dengan membaca dan mencatat poin-poin penting dari buku, jurnal, artikel, berita, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Referensi yang dimanfaatkan dapat berbentuk *hard file* atau *soft file*, seperti *e-book*.

1. 8.6. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan dan sumber pendukung tidak selalu semuanya relevan dengan pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian. Oleh karena itu, kecermatan peneliti saat mengorganisasi data menjadi sangat penting dan berpengaruh pada proses interpretasi atau pemberian makna. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data dalam metode kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai (Miles & Huberman, 1984).

Tahapan-tahapan analisis data tersebut melibatkan data reduction, data display, dan making conclusion. Data reduction, atau reduksi data, merupakan langkah di mana peneliti melakukan seleksi data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sementara data yang kurang relevan diabaikan. Data display melibatkan proses sinkronisasi data yang terpilih untuk mencapai keselarasan dalam menjawab inti permasalahan penelitian. Making conclusion, atau proses

menarik kesimpulan, merupakan tahapan terakhir di mana penulis memberikan makna atau interpretasi dari temuan penelitian berdasarkan data yang telah diorganisir.

1. 8.7. Kualitas Data

Kualitas data dan ketepatan metode merupakan dua indikator penting yang menunjukkan validitas penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, validitas diartikan sebagai upaya untuk memeriksa akurasi hasil penelitian melalui serangkaian penerapan prosedur tertentu (Creswell, 2009). Data dianggap valid jika informasi yang diperoleh dari informan dan sumber terkait tidak memiliki perbedaan atau distingsi dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan sebagai prosedur untuk memastikan validitas data. Triangulasi data adalah teknik untuk memeriksa data agar terbukti keabsahannya dengan melakukan pengecekan kembali setelah memperoleh data dari informan. Pengecekan ini dapat dilakukan melalui crosscheck dari sumber lain yang kredibel, terlibat, atau memiliki pengetahuan tentang informasi dan proses di mana data diperoleh. Dengan kata lain, keberagaman sumber yang dimiliki oleh seorang peneliti menjadi salah satu kunci untuk menganalisis secara komprehensif. Adapun cara peneliti melakukan triangulasi data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
2. Melakukan uji silang data dari informan dengan temuan di lapangan.

3. Melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil informasi melalui narasumber lain atau sumber-sumber relevan.